

RINGKASAN

Penelitian tentang politik pariwisata yang berfokus pada relasi kuasa dalam rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas ini bertujuan untuk: 1) memahami dan mendeskripsikan pola relasi kuasa dalam rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas; 2) mengetahui dan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam upaya perencanaan pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas; 3) mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor kontekstual penghambat dan pendorong dalam rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas. Melalui paradigma konstruktivisme dan perspektif strukturalisme, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas, terkhususnya di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini mengungkapkan kenyataan bahwa kegiatan politik pariwisata melalui rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas. Dari adanya perencanaan tersebut, terdapat pola relasi kuasa terjadi ketika Toto Dirgantoro selaku investor utama dan pelaku politik sendiri memiliki kekuasaan sentral dalam mengkoordinasi pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa, pengusaha desa, dan masyarakat. Dalam hal ini pihak-pihak yang diuntungkan meliputi: 1) investor utama, yaitu Toto Dirgantoro; 2) Pemerintah Kabupaten Banyumas; 3) Pemerintah Desa Sokaraja Kulon; 4) Badan Usaha Milik Desa; 5) pengusaha-pengusaha yang terdapat di dalam Desa Sokaraja Kulon. Sedangkan pihak-pihak yang dirugikan meliputi: 1) masyarakat Desa Sokaraja Kulon; 2) kecamatan Sokaraja Kulon. Sementara faktor pendukung dalam rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas adalah: 1) Adanya kerjasama investasi antara investor dengan pemerintah desa; 2) Potensi alam yang memadai; 3) ketersediaan manusia yang memumpuni; 4) DPRD Kabupaten Banyumas sedang dalam proses memperbaharui Undang-Undang terkait sistem zonasi; 5) Adanya perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas. Sedangkan faktor penghambat dalam rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis adalah: 1) Kurangnya peran serta masyarakat; 2) Sulitnya mengurus persoalan izin membangun. Kesimpulannya adalah dalam kegiatan politik tidak dapat dipungkiri adanya beberapa aktor yang memiliki kepentingan guna mendapatkan kekuasaan yang hendak dicapai, kekuasaan itu sendiri tercapai melalui relasi yang terbangun oleh pihak-pihak bersangkutan.

Kata Kunci: politik pariwisata, bisnis dan politik, relasi kuasa, rencana pembangunan, kampung wisata.

SUMMARY

The research on tourism politics that focuses on power relations in the development plan of tourist villages as a business center in the Sokaraja Kulon Village, Banyumas Regency aims to: 1) understand and describe the pattern of power relations in the tourism village development plan as a business center in Sokaraja Kulon Village, Banyumas Regency; 2) know and explain the actors involved in the planning of the development of tourist villages as a business center in Sokaraja Kulon Village, Banyumas Regency; 3) know and describe the contextual factors which are inhibiting and driving factors in the development plan of the tourist village as a business center in the Sokaraja Kulon Village, Banyumas Regency. Through the constructivist paradigm and structuralism perspective, this study uses a qualitative method with a case study approach. Located in the region of Banyumas Regency, especially in the Village of Sokaraja Kulon, Banyumas Regency.

The results of this study reveal the fact that political tourism activities through the development plan of the tourist village as a business center in Sokaraja Kulon Village, Banyumas Regency. From this plan, there is a pattern of power relations in the development plan of the tourist village as a business center in the village of Sokaraja Kulon where Toto Dirgantoro as the main investor and political actor himself has central authority in coordinating the village government, village-owned enterprises, village entrepreneurs, and the community . In this case the parties that benefit include: 1) the main investor, Toto Dirgantoro; 2) Government of Banyumas Regency; 3) Village Government of Sokaraja Kulon ; 4) Village-Owned Enterprises; 5) entrepreneurs in the Sokaraja Kulon Village. whereas the injured parties include: 1) the people of Sokaraja Kulon Village; 2) Sokaraja Kulon sub-district. While the supporting factors in the development plan of the tourist village as a business center in Sokaraja Kulon Village, Banyumas Regency are: 1) The existence of investment cooperation between the investor and the village government; 2) adequate natural potential; 3) availability of capable human beings; 4) DPRD of Banyumas Regency is in the process of updating the Law related to the zoning system; 5) There is a development of the tourism sector in Banyumas Regency. While the inhibiting factors in the plan to develop a tourist village as a business center are: 1) Lack of community participation; 2) Difficult to deal with the issue of building permits. The conclusion is that in political activities there are no denying the existence of several actors who have an interest in getting the power to be achieved, the power itself is achieved through the relations built by the parties concerned.

Keywords: *tourism politics, business and politics, power relations, development plans, tourist villages.*